

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Paska perang dingin meluasnya agenda dalam ilmu-ilmu hubungan internasional mengakibatkan munculnya isu-isu baru selain masalah keamanan, perlombaan senjata beralih menjadi masalah ekonomi, perdagangan bebas, HAM, demokrasi serta lingkungan hidup. Dinamika semua isu-isu baru tersebut merebut perhatian para pemimpin dunia khususnya pengambil kebijakan dalam menentukan langkah strategis terkait dengan isu tersebut. Ditambah lagi dengan globalisasi yang mulai masuk membuat negara-negara semakin saling bergantung dengan yang lainnya untuk membuat solusi bersama. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang paling dinamis yang menuntut keterlibatan banyak negara dan aktor-aktor lainnya seperti *Non Government Organization* (NGO) untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan ekosistem di dunia.

Permasalahan lingkungan hidup memiliki karakteristik antara hubungan manusia dengan alam yang sangat beragam meliputi; pelestarian konservasi alam yang disebabkan oleh polusi, menipisnya sumber daya yang langka dan terancam punah (stok ikan, hutan hujan dan spesis), penggunaan tenaga nuklir dan bioteknologi, masalah 'global' seperti hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan penipisan ozon¹. Penurunan kualitas lingkungan global mulai dirasakan suatu permasalahan serius terutama oleh negara-negara maju

¹ Neil Carter, *The Politics of The environmental ; ideas, activism, policy*, Cambridge university press, 2001 hal 4

atas dampak dari aktivitas industri seperti pembakaran karet, pembakaran bahan bakar fosil yang berdampak terjadinya *global warming*.

Permasalahan lingkungan seperti *Global warming* telah menarik perhatian dunia. *Global warming* atau pemanasan global merupakan dampak espiteemis dari aktivitas manusia yang sudah terasa dampaknya selama dua dekade belakangan ini. Pemanasan pada atmosfer bumi tersebut diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia mulai dari pembakaran karet, minyak, dan berbagai pembuatan bahan bakar yang menghasilkan emisi karbon dioksida (Co_2) dan juga efek berbahaya dari *green house gas* (GHGs)². Dampak dari pemanasan global itu sendiri adalah perubahan iklim yang tidak menentu. *Climate change* atau perubahan iklim menghasilkan meningkatnya volume air laut, banjir, merusak pertanian dan berbahaya bagi ekosistem alam dan spesiesnya.

Sejauh ini langkah dunia internasional dalam menangani permasalahan dari *global warming* yaitu dengan ditandatanganinya *United Nation* (UN) *Framework Convention on Climate Change* (FCCC) tahun 1992 di dalam UN *Conference on Environment and Development (the Earth Summit)* dan negosiasi di bawah FCCC yaitu *Protocol Kyoto* tahun 1997, yang meletakkan satu set sederhana pengurangan emisi gas rumah kaca wajib oleh dikembangkan oleh setiap negara³. Berbagai perjanjian yang telah dibentuk negara-negara tersebut pada dasarnya tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya, tingkat kesulitan terletak pada sulitnya setiap negara untuk mematuhi aturan yang telah dibentuk sehingga memakan waktu yang relatif lama.

² Paul G. Harris, *Global warming and East Asia*, chapter 1 The politics and foreign policy of *global warming* in East Asia, hal 3

³ *Ibid* hal 3

Pemanasan global telah menimbulkan permasalahan yang sangat serius bagi lingkungan global. Selain penipisan ozone, pemanasan global juga berdampak serius terhadap pertumbuhan ekosistem laut seperti terumbu karang, karena dampak negatif dari pemanasan global adalah *bleaching* atau pemutihan pada karang laut yang dapat menyebabkan kematian karena berkurangnya fungsi dari terumbu karang. Laut dan ekosistem di dalamnya merupakan sumberdaya alam yang harus kita jaga terutama terumbu karang, selain menawarkan keindahan juga memiliki banyak manfaat seperti menahan abrasi pasir pantai, tempat mencari makan ikan kecil bahkan untuk dijadikan komoditi ekspor juga bermanfaat sebagai obat-obatan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah kelautan yang lebih luas dibandingkan dengan daratan. Nilai kekayaan di dalamnya terdapat hasil ikan dan keindahan terumbu karang yang tidak ternilai harganya. Indonesia sendiri memiliki luas total terumbu karang sekitar 51.000 Km² atau sekitar 18% luas total terumbu karang dunia⁴. Luas tersebut tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia seperti Bali, NTT, Sulawesi utara, Kaltim dan Papua. Keindahan terumbu karang Indonesia membuat banyak wisatawan dunia sengaja mengunjungi beberapa tempat terbesar seperti kepulauan Raja Ampat untuk *snorkeling*. Selain itu, terumbu karang juga menawarkan keuntungan dalam segi ekonomisnya hal itu dibuktikan dengan Indonesia merupakan negara pengekspor terumbu karang terbesar di dunia, tercatat 200.000 karang pada 2002,

⁴Fadil Abidin, Selamatkan "Terumbu Karang Indonesia", diakses dari: <http://www.niasberbagi.com/2011/02/23/selamatkan-terumbu-karang-Indonesia/>, pada tanggal 17 maret 2011, pukul 20.19 wib.

sampai 800.000 karang pada 2005, telah diekspor dari Indonesia⁵. Namun keindahan dan nilai jual yang didapat dari terumbu karang di Indonesia semakin mengalami kemunduran sejak tahun 2004-2006 yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut⁶ :

- a) Gempa dan tsunami di Samudera Hindia tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan kerusakan terparah di ekosistem pesisir, yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dikawasan tersebut serta hilangnya 85.000 hektar hutan mangrove.
- b) Pada tahun 2005 bumi memasuki tahun terpanas terutama dibelahan bumi bagian utara, yang dapat menyebabkan pemutihan massal pada terumbu karang dan berujung kematian.
- c) Penurunan masih terus berlanjut bagi terumbu karang terutama yang berlokasi dekat dengan populasi manusia dengan hilangnya tutupan karang, populasi ikan dan kemungkinan terhadap *biodiversitas*.
- d) Bukti penurunan pertumbuhan terumbu karang akan terus bertambah dengan meningkatnya keasaman laut (*ocean acidification*) akibat pemanasan global yang akan menyebabkan kerusakan fungsi dari terumbu karang terutama di masa depan.

⁵ "Terumbu karang Indonesia", diakses dari <http://www.niasberbagi.com/2011/02/23/selamatkan-terumbu-karang-Indonesia/> pada tanggal 17 maret 2011, pukul 20.19 wib.

⁶ C. Wilkinson, *Status of Coral Reefs of The World: 2008*. Global Coral Reef Monitoring Network and Reef and Rainforest Research Centre, Townsville, Australia, hal.296

Akibat dari dampak pemanasan global, laporan terumbu karang yang terancam di Asia Tenggara menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan penurunan pertumbuhan terumbu karang selama 50 tahun terakhir, dari 10% menjadi 50% dan jika kerusakan tetap dibiarkan terjadi, maka diperkirakan akan terjadi kerugian sebesar US \$ 2,6 triliun selama periode 20 tahun⁷. Kerugian secara ekonomis akan sangat dirasakan kedepannya bagi bangsa Indonesia. Semakin berkurangnya populasi terumbu karang pada pesisir Indonesia dapat menyebabkan dampak negatif bagi kelangsungan di lingkungan pesisir pantai. Secara geografis Indonesia terletak dalam kawasan segitiga karang (*Coral Triangle*) bersama dengan 6 negara lainnya yakni ; Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Salomon. Kawasan segitiga karang juga disebut sebagai "Amazon Laut", di mana tempat ini sebagai pusat kelimpahan kehidupan laut dan keanekaragaman di planet ini yang berisikan lebih dari 75 % dari semua spesis karang yang dikenal; lebih dari 30 % dari terumbu karang dunia; hampir 40 % dari spesis ikan terumbu karang, dan luasnya hutan mangrove terbesar di dunia⁸.

Untuk itu pada pertemuan APEC (*Asia Pasific Economic Community*) di *Sydney* pada tahun 2007 telah menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi penggunaan gas emisi rumah kaca global/*green house gas* (GHGs)⁹ guna

⁷ Abdullah Habibi, Naneng Setiasih dan Jensi Sartin , *Satu Dekade Pemantauan Reef Check: Kondisi dan Kecenderungan pada Terumbu Karang Indonesia*, hal 1.

⁸ *Coral Triangle Initiative*, diakses dari <http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/asiaandthepacific/coraltriangle/overview/Coral-Triangle-Initiative.xml>, pada tanggal 23 maret 2011, pukul 22.00 wib.

⁹ Berdasarkan guidelines IPCC 1996 yang telah direvisi, yang dikategorikan sebagai gas rumah kaca adalah CO₂, metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC, merupakan kelompok gas), perfluorokarbon (PFC, merupakan kelompok gas), dan sulfur

mengurangi dampak dari pemanasan global. Dalam pertemuan tersebut Indonesia merasa sangat berkepentingan untuk membahas tentang efek dari pemanasan global bagi terumbu karang di dunia. Indonesia juga mendorong dunia untuk mengadopsi mengurangi emisi dari *deforestasi* dan skema degradasi/ *Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD)*¹⁰ sebagai alternatif untuk memotong emisi langsung¹¹.

Diplomasi Indonesia dalam menyuarakan akan pentingnya kelangsungan terumbu karang bagi kelanjutan ekosistem pesisir mendapatkan respon positif dari semua anggota APEC yang hadir dalam pertemuan tersebut terutama negara besar seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia dan lainnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merasa permasalahan terumbu karang ini merupakan permasalahan yang dapat mengancam kepentingan nasionalnya. Untuk itu Indonesia berupaya membangkitkan kesadaran semua pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Karena pada dasarnya masalah perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja apalagi dalam permasalahan ini membutuhkan konsistensi, kecanggihan teknologi serta biaya yang tidak sedikit.

heksafluorida (SF₆). Gas ini terperangkap di atmosfer bumi sehingga menyebabkan gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Akumulasi radiasi matahari di atmosfer Bumi ini menyebabkan suhu Bumi menjadi semakin menghangat

¹⁰ REDD adalah skema untuk memberikan insentif bagi negara-negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dengan menekan tingkat kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Insentif ini dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih lestari dengan menyediakan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Pengurangan emisi atau 'deforestasi yang dihindari' dapat diperhitungkan sebagai kredit karbon. Kredit tersebut selanjutnya dapat diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara-negara peserta yang melindungi hutannya.

¹¹ "Six countries launch Coral Triangle in manado", diakses dari <http://www.cti-sekretariat.net/news-a-updates/cti-updates/55-six-countries-to-launch-coral-triangle-in-manado>, pada tanggal 17 maret 2011, pukul 20.09 wib.

Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2009, di Manado telah diselenggarakan KTT pertama *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang dihadiri oleh Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Dalam pertemuan puncak tersebut para pemimpin CTI meluncurkan secara resmi CTI dalam sebuah deklarasi dan sekaligus menyepakati sejumlah langkah bertahap dan komprehensif, yang tercantum pada *Regional Plan of Action*. Isi dalam *Regional Plan of Action* tersebut mencakup lima gol utama dalam tujuan pembentukan CTI yakni¹²;

1. Prioritas bentang laut,
2. Pendekatan ekosistem perikanan mengelola dan sumber daya laut lainnya,
3. Kawasan perlindungan laut,
4. Adaptasi perubahan iklim, dan
5. Spesis terancam.

Dalam goal tersebut diharapkan dapat terealisasi dalam jangka waktu 5 tahun kedepan guna menjaga kelestarian ekosistem kelautan segitiga karang. Perjalanan diplomasi Indonesia terhitung sejak pertemuan APEC 2007 hingga peresmian CTI pada tahun 2009 tentunya tidak mudah. Untuk itu dalam penelitian ini akan menekankan pada perjalanan diplomasi Indonesia sejak 2007 hingga 2009, di mana Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara maju untuk berperan di dalam kerjasama regional CTI ini baik sebagai funding maupun menyumbang

¹²“About USCTI”, diakses dari [http://www.uscti.org/uscti/About%20Us/Plan % 20 of % 20 Action.aspx](http://www.uscti.org/uscti/About%20Us/Plan%20of%20Action.aspx), pada tanggal 17 maret 2011, pukul 20.09 wib.

penelitian. Keberhasilan diplomasi lingkungan hidup Indonesia merupakan suatu prestasi besar bagi negara dan sangat menarik untuk dikaji secara teoritis.

I.2 Pertanyaan penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah;

- Bagaimanakah upaya diplomasi lingkungan hidup Indonesia dalam membentuk kesepakatan kerjasama multilateral CTI ?
- Apa Kepentingan Indonesia di dalam membentuk kesepakatan kerjasama multilateral CTI?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya diplomatis lingkungan hidup Indonesia dalam membentuk CTI.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Indonesia, dalam mengatasi isu global lingkungan hidup khususnya dalam melindungi ekosistem terumbu karang.
3. Untuk mengetahui kepentingan Indonesia dalam membentuk CTI

I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademisi penelitian ini bermanfaat untuk memahami penerapan alat analisis yang digunakan seperti teori dan konsep dalam hubungan internasional
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk dapat diaplikasikan oleh pembuat kebijakan maupun objek-objek lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas

I.5 Tinjauan pustaka

C. Wilkinson dalam bukunya yang berjudul, "*The World's Greatest Coral reefs Challenge*"¹³ menjelaskan bahwa penurunan besar-besaran tingkat keanekaragaman hayati salah satunya dirasakan bagi ekosistem laut dunia. Berdasarkan penelitian dari para ahli dari 372 ilmuwan terumbu karang dan manajer dari 96 negara adalah saat ini dunia telah kehilangan sekitar 19% luas terumbu karang dan 15% diantaranya dalam kondisi terancam parah, yang dapat merugikan negara-negara dalam 10-20 tahun kedepan dan 20% berada di bawah ancaman kerugian pada 20-40 tahun kedepan. Nilai kerugian yang sangat besar tersebut akan sangat dirasakan bagi para penduduk pesisir karena ketergantungannya pada ikan baik untuk konsumsi maupun mata pencahariannya. Salah satu kawasan yang memiliki nilai kerugian paling besar adalah *Coral Triangle*.

¹³ C. Wilkinson, *Status of Coral Reefs of The World: 2008*. Global Coral Reef Monitoring Network and Reef and Rainforest Research Centre, Townsville, Australia.

Untuk dapat melindungi keanekaragaman hayati terumbu karang dari ancaman kerusakan, maka sangat dibutuhkan dukungan politik banyak negara dan NGO yang akan berkembang hingga membentuk suatu komitmen bersama untuk membentuk kawasan konservasi. Atas dasar inisiatif Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan APEC 2007 negara-negara *Coral Triangle* sepakat untuk membentuk *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, kepulauan salomon dan Timor Leste. Selanjutnya diikuti dengan pembentukan berbagai kerjasama konservasi lainnya seperti *Micronesia Challenge*, *Karibia challenge* dan *World Heritage and Coral Reefs*: Pada bulan Juni 2008. Perjalanan diplomasi Indonesia dalam membentuk kerjasama regional CTI dapat dikatakan sebagai pelopor negara-negara lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman penurunan yang dapat merugikan negara.

Di dalam jurnal Veron yang berjudul *Delineating Coral Triangle* mengatakan bahwa *Coral Triangle*¹⁴ adalah sebuah kawasan yang membentang dari Filipina sampai kepulauan Salomon yang terdiri atas 605 karang zooxanthellate. Kawasan CT ini memiliki 76% dari total species terumbu karang dunia membuat wilayah ini terbesar dan tertinggi dalam kawasan konservasi. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati di dalam wilayah *Coral Triangle* membuat negara-negara maupun NGO's merasa terpanggil dalam menjaga keanekaragaman wilayah tersebut. Pada tahun 2001 *World Summit On Sustainable Development* (WSSD), *World Park Congress* dan *Convention On*

¹⁴ Veron, Lyndon M. Devantier, Emre Turak, Alison L. Green, Stuart Kininmonth, Mary Stafford-Smith and Nate Peterson, *Delineating the Coral Triangle*, Galaxea, Journal of Coral Reef Studies 11: 91-100 (2009)

Biological Diversity (CBD) tahun 2003 memberikan dukungan politik yang tinggi untuk wilayah ini dengan mendirikan MPA melalui perjanjian multilateral dan program perlindungan. Selanjutnya pada tahun 2007 di Sydney, 21 pemimpin dunia yang hadir dalam pertemuan APEC menyetujui usulan pemerintahan Indonesia dalam membentuk CTI (*Coral Triangle Initiative*) sebagai suatu mekanisme kawasan konservasi untuk melindungi bagian dari keanekaragaman terumbu karang dunia. Inisiatif Indonesia dalam pertemuan APEC tersebut dilanjutkan dengan pertemuan formal di Bali pada Desember 2007 di bawah UNFCCC dalam membahas lebih jauh agenda pembentukan CTI.

Selanjutnya di dalam buku yang berjudul *Satu Dekade Pemantauan Reef Check: Kondisi dan Kecenderungan pada Terumbu Karang Indonesia*¹⁵ oleh Abdullah Habibi, Neneng Setiasih dan Jensi Sartin dijelaskan bahwa mengapa Indonesia berperan besar dalam inisiatif yang diajukan dalam pertemuan APEC. Indonesia sebagai salah satu negara *Coral Triangle* memiliki luas total terumbu karang sebesar 51.000 km² atau sekitar 18% dari total luas terumbu karang dunia dengan 60% spesies terumbu karang dunia berada di negara ini. Namun keanekaragaman terumbu karang Indonesia kerap mendapatkan berbagai ancaman dalam pertumbuhannya yang disebabkan oleh aktivitas manusia (limbah, penangkapan berlebihan, pengeboman dll) dan *coral bleaching* yang disebabkan oleh *global warming*. Laporan Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara menyebutkan bahwa selama 50 tahun terakhir, proporsi penurunan

¹⁵ Abdullah Habibi, Neneng Setiasih, Jensi Sartin *Satu Dekade Pemantauan Reef Check: Kondisi dan Kecenderungan pada Terumbu Karang Indonesia, Jaringan Kerja Reef Check Indonesia* © 2007

kondisi terumbu karang Indonesia telah meningkat dari 10% menjadi 50% dan jika kerusakan tetap dibiarkan terjadi, maka diperkirakan akan terjadi kerugian sebesar US \$ 2,6 triliun selama periode 20 tahun. Nilai yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan senilai lebih dari US \$ 1,6 triliun per tahun jika ekosistem ini tetap dijaga dalam keadaan sehat.

Di dalam “Jurnal Internasional Kelautan, Implikasi Perubahan Iklim di Kawasan *Coral Triangle Initiative* (CTI)¹⁶” dikatakan bahwa Secara geografis wilayah pesisir dan laut Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama yang disebabkan oleh naiknya temperatur dan muka air laut. Dari hasil studi yang telah dilakukan hingga saat ini, perubahan iklim secara signifikan telah mempengaruhi beberapa fenomena alam skala global dan regional, seperti meningkatnya jumlah kejadian siklon tropis, meningkatnya jumlah kejadian *El Nino Southern Oscillation* (ENSO), dan bergesernya pola musim. Peningkatan temperatur air laut pada El Nino 1997 diketahui telah menyebabkan masalah serius pada ekosistem terumbu karang di perairan Asia Tenggara. *Wetlands International*¹⁷ melaporkan bahwa kejadian El Nino tersebut telah menghancurkan sekitar 18% dari ekosistem terumbu karang di kawasan Asia Tenggara. Di perairan Indonesia sendiri pemutihan terumbu karang (*coral bleaching*) diketahui telah terjadi di banyak tempat seperti di bagian timur Pulau Sumatera, Jawa, Bali

¹⁶ Jurnal Internasional Kelautan, “Implikasi Perubahan Iklim di Kawasan *Coral Triangle Initiative* (CTI)”, Balai Riset dan Observasi Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia 2011

¹⁷ Wetlands International, yang merupakan Organisasi Non-Pemerintah dan bekerja secara global, regional, nasional hingga lokal untuk mencapai tujuan konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana, sebagai bentuk sumbangan bagi terwujudnya pembangunan secara berkelanjutan

dan Lombok. Sementara itu, di Kepulauan Seribu sekitar 90-95% terumbu karang yang berada di kedalaman 25 m sebagian besar telah mengalami pemutihan.

I.6 Kerangka Teori

I.6.1 Kebijakan Luar Negeri (*foreign policy*)

Di dalam penelitian ini salah satu teori yang paling berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni kebijakan luar negeri. Ada banyak sekali definisi tentang kebijakan luar negeri yang merupakan langkah konkrit dari politik dalam negeri. Menurut Mark R. Amstutz kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai tindakan secara langsung yang dijalankan oleh suatu pemerintah/negara sebagai suatu langkah mempromosikan kepentingan nasional negara¹⁸. Dalam pengertiannya kebijakan luar negeri memiliki konsep dari promosi kepentingan nasional yang melewati garis batas suatu negara. Kepentingan nasional merupakan *goals* suatu negara dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat di dalam suatu negara, sedangkan melewati garis batas berarti tindakan tersebut memiliki dampak langsung/interaksi bagi negara-negara lain. Menurut Miroslav Ninic terdapat tiga kriteria dalam mendefinisikan kepentingan nasional¹⁹ yaitu; pertama kepentingan itu harus bersifat vital sehingga dalam rangka mencapai hal tersebut menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat, kedua kepentingan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan

¹⁸ Mark R Amstutz, *international conflict and cooperation: An introduction to world politics*. Dubuque: Brown and Benchmark hal 146. Dikutip dari Jemat Alexius, politik Global dalam Teori dan Praktik. Graham ilmu 2008 hal 64.

¹⁹ Miroslav Nincic, *Democracy and foreign Policy: The Falacy of political realism*. New York: Coulombia University Press hal.157. Dikutip dari Jemat Alexius, politik Global dalam Teori dan Praktik. Graham ilmu 2008 hal 67.

internasional dan yang terakhir (ketiga) kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan sehingga menimbulkan kepedulian secara menyeluruh oleh berbagai kalangan.

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu skala prioritas Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sebagai negara kelautan, inisiatif Indonesia dalam CTI merupakan bentuk kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi penurunan pertumbuhan terumbu karang 5 tahun belakangan ini. Terumbu karang sebagai salah satu ekosistem yang penting di laut memiliki nilai lebih dari sekedar keindahannya tetapi juga sebagai habitat mencari makan ikan-ikan kecil di laut. Menurunnya pertumbuhan terumbu karang berarti mengancam populasi ikan di dalamnya yang dapat digunakan baik untuk komoditi ekspor maupun konsumsi masyarakat. Selain itu terumbu karang juga mengancam nilai ekonomi yang cukup besar sebagai komoditi ekspor. Indonesia melihat bahwa Penurunan pertumbuhan terumbu karang Indonesia dapat mengancam kepentingan nasionalnya. Untuk itu Indonesia berupaya melakukan diplomasi pada pertemuan APEC yang juga mengajak negara-negara lainnya untuk bersama-sama memperhatikan dan menjaga secara berkelanjutan pertumbuhan terumbu karang yang hasilnya akan dinikmati oleh generasi penerus.

1.6.2 Diplomasi Lingkungan (*Environmental Diplomacy*)

Salah satu konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah diplomasi lingkungan. Diplomasi lingkungan terdiri atas dua konsep dasar yakni konsep diplomasi dan konsep lingkungan. Menurut M. Scoullos dan A. Roniotes

diplomasi lingkungan dapat diartikan sebagai berbagai tindakan diplomatik baik dalam forum bilateral maupun multilateral antara negara satu dengan yang lainnya, yang terkait dengan negosiasi dan kesepakatan secara tradisional termasuk dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung membahas tentang perlindungan, penggunaan dan pengelolaan lingkungan atau alat buatan manusia, tanah, air (termasuk laut) dan atmosfer - serta ekosistem terkait dan biosfer secara luas²⁰. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk saat ini membawa kepedulian negara-negara dan seluruh lapisan seperti NGO, aktivis untuk bersama-sama mencari solusi atas penurunan yang terjadi, karena permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara, *global warming*, *deforestasi*, dan lainnya tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan peran serta dan bantuan dari negara lainnya untuk menyelesaikannya. Ketidakmampuan negara untuk mengatasi permasalahan lingkungan membuat langkah diplomasi lingkungan hidup menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara.

Keterkaitan antara kebijakan luar negeri suatu negara dengan diplomasi lingkungan hidup dapat dilihat dari contoh kasus berikut ini: besarnya pengaruh dari globalisasi ekonomi, perdagangan dan kegiatan investasi, menyebabkan sumberdaya alam semakin terancam oleh eksploitasi berlebihan (kayu, sumber daya air, tanah, persediaan ikan, keanekaragaman hayati) dalam negara tanpa adanya kebijakan mapan dan efektif bagi lingkungan nasional. Untuk itu diplomasi lingkungan hidup diperlukan suatu negara sebagai hasil rumusan dari

²⁰ M. Scoullou dan A. Roniotes, *The Evolution of Environmental Policies in the Mediterranean from an NGO perspective*, Athens 2003, hal 13.

kebijakan luar negeri suatu negara di dalam melindungi lingkungan dari dampak berbagai aktivitas manusia.

Ada dua macam kondisi yang menyebabkan suatu negara harus melakukan tindakan diplomasi lingkungan hidup yakni²¹:

1. Negosiasi tentang penurunan lingkungan hidup di mana antara satu negara dengan negara lainnya terpengaruh dengan cara yang berbeda dengan menggunakan badan-badan internasional, dan tindakan yang diambil oleh negara atau badan hukum lainnya. Sebagai contoh negosiasi penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), spesies yang dilindungi, stok ikan yang dilindungi perairan internasional dan polusi laut yang disebabkan oleh kapal.
2. Tidak adanya atau adanya kegagalan kebijakan suatu negara untuk menerapkan Undang-undang yang ada sehingga menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi negara tetangga. Sebagai contoh: emisi dari pabrik-pabrik negara A menyebabkan hujan asam dan kerusakan hutan-hutan di negara B atau ketika lingkungan global bersama rusak (Misalnya emisi yang merusak lapisan ozon atau berkontribusi terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia).

Pada praktiknya diplomasi lingkungan hidup dilakukan dalam suatu forum internasional yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara serta mendapatkan dukungan yang besar dari negara yang hadir dalam forum internasional. Untuk mencapai kepentingan nasional yang merupakan tujuan dari diplomasi dibutuhkan lobi dan negosiasi yang dilakukan

²¹ *Ibid*, hal 16-17

oleh perwakilan suatu negara. lobi adalah langkah awal sebelum melakukan negosiasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi negara lain dalam forum multilateral untuk suatu tujuan tertentu, sedangkan negosiasi adalah tindak lanjut dari lobi untuk menyatukan kepentingan bersama dalam membentuk suatu keputusan.

Dalam melakukan negosiasi terutama pada isu lingkungan hidup global, negara-negara memainkan empat peranan penting yaitu; *lead state*, *supporting state*, *swing state*, maupun *veto blocking state*²². *Lead state* memiliki kemauan besar untuk menanggapi isu yang berkembang, dengan tindakan internasional dan berupaya memperoleh dukungan dari negara lain. *Supporting state* mendukung sepenuhnya usulan dari *lead state*. *Swing state* akan meminta koneksi-koneksi yang berguna bagi kepentingannya sebagai timbal balik atas dukungan yang diberikan. Sedangkan *veto state* secara terang-terangan menentang bahkan melemahkan suatu usulan agar dianggap tidak efektif.

Negosiasi dalam isu lingkungan global memungkinkan negara yang berpartisipasi untuk memikirkan untung dan ruginya walaupun kebanyakan dari perwakilan negara ini akan menolak sebuah perjanjian yang berpotensi merusak kepentingan nasionalnya walaupun hal itu pada akhirnya dapat menyelamatkan negara bahkan dunia²³. Dalam membuat perjanjian lingkungan tidak lepas dari adanya campur tangan pihak pemangku kepentingan yang dikenal dengan *Stakeholder*. *Stakeholder* terdiri atas perwakilan bisnis dan industri, kelompok

²²Gareth Porter and Janet weish Brown, *Global Environmental Politics: Dilemmas in World Politics*. 2nd ed Colorado Westview press, 1996 hal 32-40

²³Lawrence E Susskind , *Environmental Diplomacy, Negotiating More Effective Global Agreements* ,hal 4

aktivis lingkungan, dan organisasi ilmiah, yang semuanya menuntut agar dikonsultasikannya kepentingan mereka dalam negosiasi tersebut²⁴. *Stakeholder* berkomitmen dan bertanggung jawab atas perjanjian lingkungan yang telah disepakati²⁵. Perbedaan kepentingan masing-masing perwakilan negara dan NGO ini membuat sulitnya mencapai suatu kesepakatan bersama. Adanya perbedaan kepentingan dari berbagai perwakilan yang hadir tersebut karena keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh manusia dapat menyebabkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Oleh karena itu diplomasi lingkungan hidup bertujuan untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama di dalam melakukan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak penurunan bagi lingkungan yang diaplikasikan melalui bentuk kerjasama regional maupun kerjasama multilateral. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dibentuk negara-negara dalam satu kawasan tertentu yang beranggotakan lebih dari dua negara, sedangkan kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang beranggotakan negara-negara lintas kawasan, International NGO yang memiliki kepentingan bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk komitmen yang mengikat secara hukum harus ada kesepakatan dan ratifikasi beberapa Perjanjian / Konvensi / Protokol oleh cukup banyak negara.

I.6.3 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development*)

Menurut Edith Weiss Brown berbagai bentuk aktivitas manusia dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan yang berdampak langsung bagi

²⁴ *Ibid* hal 3

²⁵ *Ibid* hal 133

generasi penerus²⁶. Dalam menjaga lingkungan global yang hasilnya dapat dinikmati oleh generasi penerus kita dibutuhkan komitmen negara-negara untuk bekerjasama menjaga lingkungan global ini. Komitmen negara-negara di dalam menjaga sumberdaya alam diwujudkan dalam *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable development* adalah suatu pembangunan yang bertujuan untuk menjaga kebutuhan saat ini tanpa mengurangi ketersediaan kebutuhan untuk masa depan²⁷. Kompleksitas dalam pembangunan berjangka memiliki banyak unsur seperti, manusia, lingkungan dan pembangunan dalam masa lampau, saat ini dan masa depan. Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dikenal dunia pada tahun 1972 pada saat konvensi bumi. Pada saat itu permasalahan serius mulai dirasakan para pemimpin dunia untuk mulai memikirkan menjaga kekayaan alam dan lingkungan global untuk dapat dinikmati oleh generasi penerus. Permasalahan lingkungan global seperti hutan gundul, *global warming* membutuhkan perhatian bersama dalam menjaganya untuk kebutuhan mendatang. Karenanya penanaman kembali hutan yang telah gundul memakan waktu yang sangat lama tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja, dibutuhkan peran negara lain, NGO masalah lingkungan untuk mendapatkan bantuan dana dalam menyukseskan proyek ini. Manfaat dari pembangunan berkelanjutan memang tidak dapat langsung dinikmati oleh generasi saat ini, namun dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

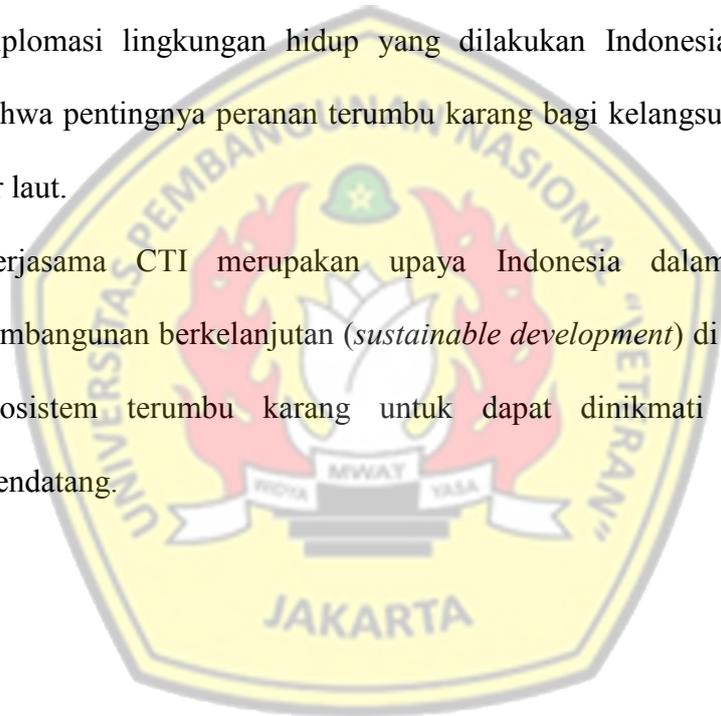
²⁶Lawrence E. Susskind, *Environmental Diplomacy, Negotiating More Effective Global Agreements* hal 54

²⁷Okechukwu Ukaga, Chris Master, dan Mike Reichenbach, *Sustainable Development Principles, Frameworks, and Case Studies*, hal ix

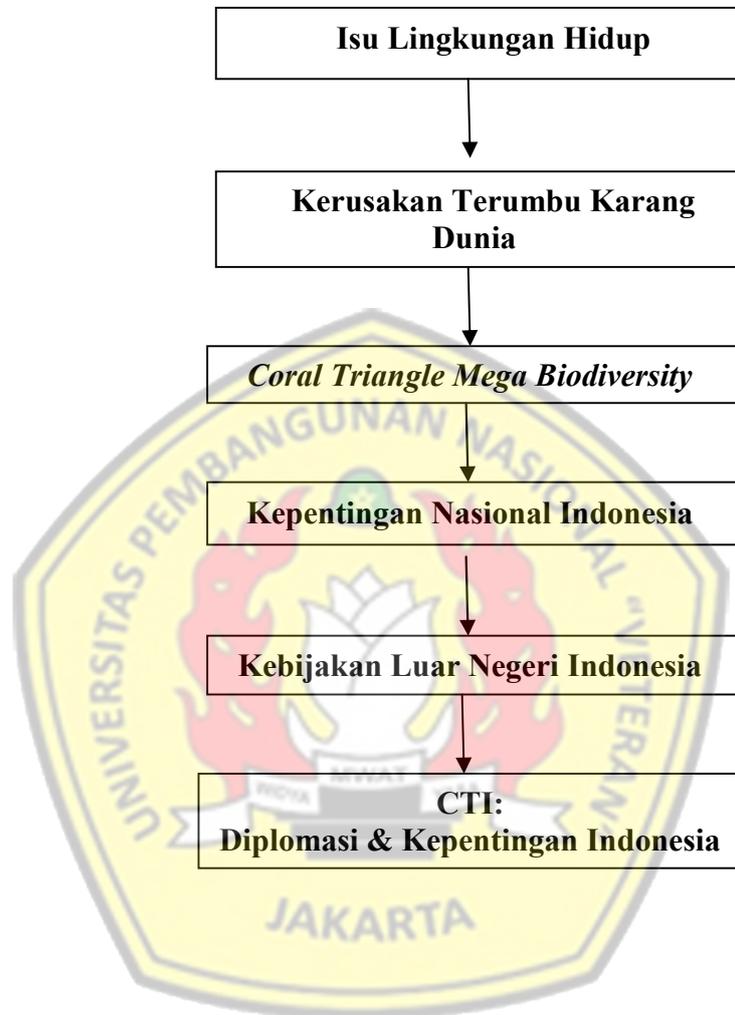
I.7 Asumsi

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik asumsi:

1. Isu lingkungan hidup merupakan permasalahan global yang membangkitkan negara-negara untuk melakukan diplomasi lingkungan hidup
2. Diplomasi lingkungan hidup yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa pentingnya peranan terumbu karang bagi kelangsungan ekosistem air laut.
3. Kerjasama CTI merupakan upaya Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di dalam menjaga ekosistem terumbu karang untuk dapat dinikmati oleh generasi mendatang.



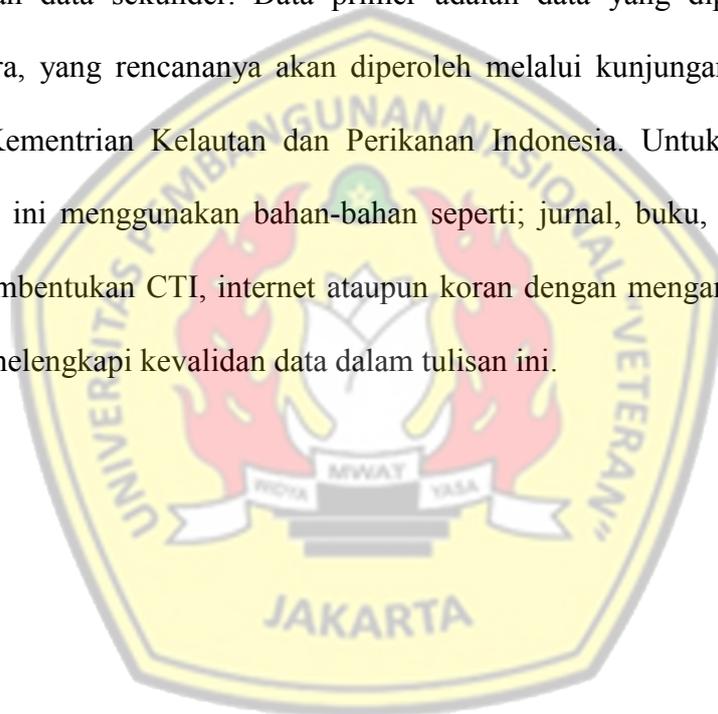
I.8 Alur Pemikiran



I.9 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah kualitatif deskriptif dan analitis dengan tujuan untuk menggambarkan secara detail dan terperinci upaya-upaya diplomatis Indonesia dalam membentuk CTI.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara, yang rencananya akan diperoleh melalui kunjungan ke sekretariat CTI di Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Untuk data sekunder penelitian ini menggunakan bahan-bahan seperti; jurnal, buku, dokumen resmi dalam pembentukan CTI, internet ataupun koran dengan menganalisis data-data tersebut melengkapi kevalidan data dalam tulisan ini.



I.10 Sistematika Penulisan

Untuk dapat menjelaskan dan mempermudah penelitian ini maka penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, alur pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Dan diharapkan pada bab ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

BAB II Kerusakan Terumbu Karang Sebagai Isu Lingkungan Hidup Global

Bab ini akan membahas isu terumbu karang sebagai isu lingkungan hidup global, kerusakan-kerusakan terumbu karang dunia, kerusakan terumbu karang Indonesia sebagai bagian dari *Coral Triangle*, fungsi dan nilai terumbu karang dan dilanjutkan dengan inisiatif dunia terhadap kerusakan terumbu karang.

BAB III CTI dan Permasalahan Terumbu Karang: Diplomasi dan Kepentingan Indonesia

Bab ini akan melihat kepentingan nasional Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia atas kerusakan terumbu karang, diplomasi Indonesia dalam membentuk CTI, tahap-tahap peresmian CTI-CFF dan kepentingan Indonesia dalam membentuk CTI.

BAB IV Kesimpulan

Merupakan kesimpulan dari seluruh penjabaran dan analisa yang terdapat di bab-bab sebelumnya yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.

